

Struktur pemerintahan kerajaan Mataram di Jawa Timur berdasarkan data prasasti abad ke-10

Edhie Wurjantoro, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20312144&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Salah satu bagian Sejarah Nasional Indonesia yang belum tuntas ditulis adalah masa awal kerajaan Mataram setelah pusat pemerintahannya dipindahkan oleh Mpu Sindok ke Jawa Timur dari Jawa Tengah. Sampai saat ini, penulisan Sejarah Nasional Indonesia (Jaman Kunonya) belum dapat dilakukan secara tuntas, Ada beberapa periode yang belum dapat diuraikan secara rinci. Masalahnya adalah sumber sejarah yang ditemukan kembali sampai sekarang sangat terbatas. Kalaupun sumber sejarah ada, tetapi tidak bisa memberikan gambaran yang lengkap mengenai suatu peristiwa. Jadi, dengan sendirinya gambaran yang menyeluruh dan jelas mengenai perjalanan sejarah bangsa Indonesia dengan segala aspeknya di masa lampau, tidak bisa diperoleh secara lengkap. Salah satu di antara periode sejarah 'kuna' Indonesia yang belum bisa diuraikan dengan jelas ialah bagian permulaan kerajaan Mataram 'kuna' setelah pusat kerajaannya dipindahkan ke Jawa Timur.

Kerajaan Mataram 'kuna' berkembang sejak permulaan abad ke-8 sampai permulaan abad ke-10, dengan pusatnya di daerah Mdang di wilayah Poh Pitu. Pada masa itu kerajaan Mataram 'kuna' mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan raja Balitung. Pengaruh atau wilayah kekuasaannya meliputi daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Namun, setelah kerajaan Mataram diperintah oleh raja pengganti Balitung, secara berangsur-angsur tetapi pasti, kerajaan itu mulai mengalami kemunduran. Bahkan kerajaan itu terpaksa dipindahkan ke Jawa Timur oleh Mpu Sindok. Tidak diketahui dengan pasti apa yang menjadi sebab perpindahan pusat pemerintahan ke Jawa Timur.

Dari sumber 23 prasasti Mpu Sindok dapat diketahui struktur pemerintahan kerajaan Mataram setelah pusatnya dipindahkan ke Jawa Timur, pada awalnya masih mengikuti struktur pemerintahan sebelumnya. Hal ini disebabkan Mpu Sindok pernah menjadi pejabat tinggi pada masa pemerintahan raja Rakai Layang Dyah Tulodhong dan raja Rakai Sumba Dyah Wawa. Demikian juga dengan sejumlah pejabat pada masa pemerintahan raja Wawa tetap dipakai sebagai pembantunya. Dalam perkembangannya kemudian dilakukan perubahan, terutama pada pejabat yang menerima dan yang melaksanakan perintah raja, Serta pejabatan yang masuk dalam dewan penasehat raja.

Sementara itu struktur perwilayahan juga mengalami perubahan. Jika pada masa pemerintahan Raja Wawa, wilayah dibagi menjadi wilayah pusat pemerintahan di mana raja dan para pejabat tinggi kerajaan tinggal, dikenal dengan sebutan *wanna i jro turns* (wilayah di dalam tembok/benteng/pagar). Wilayah ini dibatasi dengan wilayah *wanna* yang ada di empat penjuru mata angin. Kemudian ada wilayah watak dengan para Rakai (bangsawan keluarga raja) sebagai penguasanya. Wilayah watak ini tidak selalu sama luasnya. Ada wilayah watak yang membawahi 4 *wanna* (desa), tetapi ada juga yang membawahi lebih dari 12 *wanna*. Tiap

wanua dipimpin oleh seorang rama (kepala desa), atau lebih. Selumh wilayah kerajaan yang terdiri dari sejumlah watalc dan wanna, di sebut bhumi (kerajaan atau negara). Pada masa Mpu Sindok, wilayah kerajaan tidak lagi terdiri dari walak dan wanna, tetapi terdiri dari rajya atau lingkungan disekitar raja/keraton, sejumlah thani (desa) yang dipimpin oleh seorang duwan (kepaia desa). Lalu ada wisaya yang terdiri dari sejumlah thani.